



**DOKUMEN RENCANA KERJA  
(RENJA)  
2023**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMPANG  
2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka Pembangunan Daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks Pembangunan Manusia. Dalam perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan Wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 ( satu ) tahun yang dinamakan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD. Ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam Menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja

DPMPTSP tahun 2023 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan dan akan menjadi bagian dari Renstra DPMPTSP tahun 2023 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) DPMPTSP Tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

- Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  24. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
  27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
  32. Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023;
  33. Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.

### **33.3. Maksud dan Tujuan**

Perencanaan urusan Pemerintah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tahun 2023 tertuang pada RKPD tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan urusan pemerintah.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun yang sesuai dengan VI Si, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah :

1. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan Organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan Organisasi;
2. Tersedianya instrument awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan

- digunakan oleh pihak – pihak dalam rangka menilai kinerja Organisasi;
3. Tersedianya instrument yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
  4. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran – sasaran strategis dalam visi dan misi kabupaten Sampang.

#### **33.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023, meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja ( Renca ) berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun lalu serta hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal ini dimaksud bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahawa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 s/d 2022 di tentukan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Sampang Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat dari tabel T – C .29.



Tabel T – C. 29

## Pencapaian Renstra DPMPSTSP NAKER s/d tahun 2022 ( tahun berjalan )

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPSTSP NAKER Kabupaten Sampang

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> ) / Sub Kegiatan ( <i>Output</i> )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
	<b>Tujuan :</b>										
	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan realisasi Investasi	%	0,32	-16,99	0,08	0,13	1,63	0,16	-73,04	-228,25
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,51	162,73	81,95	81,43	0,99	82,47	244,16	2,92
	<b>Sasaran :</b>										
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi Investasi	Juta Rp.	310.223.389.000	719.698.894.000	299.943.870.000	297.513.257.000	0,99 %	303.257,158	1.147.572.042.990	3,70
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,75	186,29	93,25	93,26	100,01	23,30	302,85	3,23
<b>2.12.01</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>										
2.12.2.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	193,34	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12. 01.01.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	surat	13950	3700	-	-	-	-	-	-
		Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	rekening	4	8	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	11	22	-	-	-	-	-	-
		Jumlah tenaga kebersihan	OB	4	8	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome ) / Kegiatan ( Output ) / Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan	Exp	144	33	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	Orang	84	85	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi teknis	Ob	1	2	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	jenis	286	91	-	-	-	-	-	-
		Jumlah barang cetakan	Jenis	56	20	-	-	-	-	-	-
		Jumlah barang penggandaan	Jenis	64	22	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Komponen instalasi listrik	jenis	123	45	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Alat Kebersihan Yang Disediakan	Jenis	192	51	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	liter kali	9340	1656	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinasi Luar Daerah	kali	590	52	-	-	-	-	-	-
				300	97	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100	100	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.12.01.02.01	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	- Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	1	1	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome ) / Kegiatan ( Output ) / Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		- Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	2	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.12.01.02.02	Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	- Jumlah Kendaraan dinas R4 yang diadakan	Unit	2	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan dinas R2 yang diadakan	Unit	12	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan dinas R4 yang dipelihara	Unit	6	8	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.12.01.02.03	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Kantor	Unit	86	20	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	unit	10	12	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan peralatan Kantor	Unit	47	9	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera Yang Disediakan	Unit	8	40	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	100	100	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.05.01.	Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Ok	72	12	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome ) / Kegiatan ( Output ) / Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.01.06.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	100	100	-	-	-	-	-	-
2.10.01.2.12.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJiP	Dok	6	11	-	-	-	-	-	-
2.10.01.2.12.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	Dok	4	9	-	-	-	-	-	-
2.10.01.2.12.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	Dok	1	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah		1	1	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.15.	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	912	3363	-	-	-	-	-	-
		Rapat-rapat Perencanaan Penanaman Modal Daerah dan RKPPMD	Kali	24	4	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.15.03	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Profil/ Prospektus Investasi dan Regulasi Kebijakan Penanaman Modal	propektus	6	2	-	-	-	-	-	-
			peraturan PM	6	1	-	-	-	-	-	-
			FGD	2	1	-	-	-	-	-	-
			peta peluang investasi	1	2	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.15.04	Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang akan diikuti	Matcmaking / Gathering , pameran	8	1	-	-	-	-	-	-
				8	3						

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output )/ Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.01.16.	<b>Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Nilai investasi PMDN</b>	(juta rupiah)	<b>967.865,730</b>	<b>117.145.250.484</b>	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.16.01	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan/ Pengawasan	pelaku usaha	440	70	-	-	-	-	-	-
		Jumlah fasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	pelaku usaha	200	40	-	-	-	-	-	-
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	14	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.16.02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi dan Fasilitasi Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	200	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.16.03	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	paket aplikasi	11	3	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengolahan data penanaman modal	laporan	48	0	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.17.	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>138,44</b>	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.17.01	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor I	Jumlah Pemohon Izin yang telah diterbitkan di sektor I	izin	50	84	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.17.02	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor II	Jumlah Pemohon Izin yang telah diterbitkan di sektor II	izin	70	44	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.17.03	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor III	Jumlah Pemohon Izin yang telah diterbitkan di sektor III	izin	50	65	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.18.	<b>Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan</b>	<b>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>99,73</b>	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.18.01	Fasilitasi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan	pengaduan	100	13	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output )/ Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog/Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.12.2.12.01.18.02	Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Peningkatan SDM	orang	344	70	-	-	-	-	-	-
		Jumlah regulasi Perbub baru dan sosialisasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan		2	2	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.18.03	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Jumlah Laporan	pelaporan	12	12	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>										
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	100	0	100	100	1	27,17	127,17	1,27
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	100	0	100	100	1	5,74	105,74	1,057
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ( Renstra, Renja, Sop )	Dok	3	-	3	3	1	-	3	1
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA – SKPD	Dok	1	-	1	1	1	-	1	1
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA – SKPD	Dok	1	-	1	1	1	-	1	1

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output )/ Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog/Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA – SKPD	Dok	1	-	1	1	1	-	1	1
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA – SKPD	Dok	1	-	1	1	1	-	1	1
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah ( LPPD, LKPI, SPIP, SAKIP, RB )	Dok	5	-	5	5	-	1	5	1
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>29,82</b>	<b>129,82</b>	<b>1,29</b>
2.18.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	orang	50	-	60	60	1	50	110	2,2
		Jumlah kontrak daerah yang dibayar gajinya	Ob	1	-	1	1	1	1	2	2
2.18.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor	Jenis	46	-	46	46	1	0	46	1
2.18.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dok	1	-	1	1	1	0	1	1
2.18.01.2.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan / triwulanan/ semesteran SKPD	Dok	3	-	3	3	1	2	5	1,67
<b>2.18.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan laporan barang milik daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output )/ Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	Dok	1	-	1	1	1	0	1	1
		Jumlah dokumen RKPBMMD	Dok	1	-	1	1	1	0	1	1
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen semesteran barang milik daerah	Dok	1	-	1	1	1	0	1	1
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rasio Pegawai yang mengikuti bintek dan jumlah ASN</b>	%	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	Ok	10	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang - undangan	Ok	7	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	%	<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>22,37</b>	<b>122,37</b>	<b>1,22</b>
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Jenis	15	-	24	24	1	4	28	1,87
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	Jenis	56	-	56	56	1	15	71	1,27
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	6	-	6	6	1	1	7	1,16



Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome ) / Kegiatan ( Output ) / Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog/Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah spanduk / umbul - umbul / bendera yang diadakan	Jenis	3	-	3	3	1	0	3	1
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat Tulis Kantor	jenis	50	-	0	0	0	14	14	0,28
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis	10	-	10	10	1	1	11	1,1
		Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Jenis	1	-	1	1	1	0	1	1
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exp	4	-	48	48	1	2	50	12,5
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman tamu	Ob	300	-	380	380	1	93	473	1,57
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan makanan dan minuman rapat	Ob	50	-	50	50	1	20	70	1,4
		Jumlah kebutuhan BBM	Liter	1000	-	600	518	0,86	602	1120	1,12
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kali	400	-	17	16	0,94	10	26	0,065
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kali	500	-	26	12	0,46	11	23	0,05

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome ) / Kegiatan ( Output ) / Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah	%	100	-	100	100	1	0	100	1
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan lemari arsip	Unit	-	-	2	2	1	0	2	-
		Jumlah pengadaan filling cabinet	Unit	-	-	2	2	1	0	2	-
		Jumlah pengadaan running text	Unit	-	-	1	1	1	0	1	-
		Jumlah pengadaan kursi lipat	Unit	-	-	15	15	1	0	15	-
		Jumlah pengadaan kursi sofa	Set	-	-	6	6	1	0	6	-
		Jumlah pengadaan AC	Unit	-	-	0	0	0	0	-	-
		Jumlah pengadaan play ground anak	set	-	-	1	1	1	0	1	-
		Jumlah pengadaan tandon air atas	unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan meja rapat	unit	-	-	10	10	1	0	10	-
		Jumlah pengadaan kursi rapat	unit	-	-	10	10	1	-	10	-
		Jumlah Pengadaan komputer / laptop	unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan printer	unit	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun / di rehab	lunit	-	-	1	1	1	-	1	-
		Jumlah pagar kantor yang dibangun	l unit	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	-	100	100	1	35,90	135,90	1,359
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat	2350	-	2250	2250	1	712	2.962	1.26

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output )/ Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	Bulan	12	-	12	12	1	6	18	1,5
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	ob	23	-	26	26	1	25	51	2,21
<b>2.18.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>30,95</b>	<b>130,95</b>	<b>1,31</b>
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	unit	6	-	6	6	1	3	9	1,5
		Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit	13	-	13	13	1	8	21	1,61
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	58	-	26	26	1	27	53	0,91
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	2	-	2	2	1	1	3	1,5
2.18.01.2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok	1	-	1	1	1	0	1	1
		Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	1	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output )/ Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah potensi Investasi	peta	6	-	1	0	-	-	-	-
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peluang investasi	peluang investasi	6	-	1	0	0	-	-	-
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah propektus kabupaten	propektus	2	-	-	-	-	-	-	-
		Rapat -rapat perencanaan penanaman modal dan RKPPMD	Kali	4	-	-	-	-	-	-	-
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor ( PMDN / PMA )	investor	2900	-	867	3.563	4,11	1.180	4.743	1,64
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	investor	2900	-	867	3.563	4,11	1.180	4.743	1,64
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat Investor / Matchmaking	matchmaking	1	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	kali	2	-	-	-	-	-	-	-
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%	100	-	100	100	100	30,98	-	-
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	-	100	80	80	0	-	-

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome ) / Kegiatan ( Output ) / Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100	100	1	30,98	130,98	1,31
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di sektor I	izin	50	84	50	10	0,2	0	94	1,88
		Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di sektor II	izin	70	44	1000	4.044	4,044	0	4.088	58,4
		Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan di sektor III	izin	50	65	60	1.941	32,35	0	2.006	40,12
		Jumlah Izin OSS	izin	2500					1.287	1,287	0,51
		Jumlah Izin Non OSS	izin	2600					1.223	1,223	0,47
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan tindak lanjut yang ditangani	Laporan	100	-	100	0	0	0	-	-
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang melapor di LKPM	Pelaku usaha	675	-	120	58	0,48	30	88	0,13
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang melapor di LKPM	Pelaku usaha	675	-	120	58	0,48	30	88	0,13
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan	pelaku usaha	90	-	70	55	0,79	0	55	0,61
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	pelaku usaha	50	-	40	406	10,15	0	406	8,12
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	2	-	2	0	0	2	2	1

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output )/ Sub Kegiatan ( Output )		Target Kinerja Prog./Keg/ Sub Keg Pada Akhir Periode Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan keluaran Keg. s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan / Sub Keg. (Renja PD Tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target Renja PD Ta. 2021	Realisasi Renja PD Ta. 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Prog & Keg s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Resntra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 =(5+7+9)	11= (10/4)
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	pelaku usaha	90	-	70	30	0,43	0	30	0,33
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DARA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Nilai Investasi PMDN	Juta Rp.	967.865,730	1.153.452.000	654.170,714	343.102,489	0.52	266.557.839.409	1.763.112.328.409	1,82
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMDN	Juta Rp.	967.865,730	1.153.452.000	654.170,714	343.102,489	0.52	266.557.839.409	1.763.112.328.409	1,82
2.18.05.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengembangan sistem informasi penanaman modal	paket aplikasi	2	-	-	-	-	0	-	-
		Jumlah pengolahan data penanaman modal	laporan	12	-	12	12	1	0	12	1

Sampang, Agustus 2022  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KAB. SAMPANG**

**Ir. MAJID SYAMRONI, M. Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670324 199710 1 001**

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dpmpmsp Naker sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2019 dan 2020 nihil, dikarenakan Periode Resntra DPMPTSP adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang ada nilai realisasinya hanya Tahun 2021 saja dikarenakan adanya perubahan ke PERMENDAGRI 50 tahun 2020
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena adanya perubahan pada SOTK dari DPMPTSP NAKER menjadi DPMPTSP .

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang**

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2019 - 2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel T – C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPTSP Kabupaten Sampang**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(13)
<b>1.</b>	<b>Persentase Kenaikan Realisasi Investasi</b>			<b>0,08%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,32%</b>	<b>(-26,69) %</b>	<b>0,13</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,32%</b>	
a.	Nilai Realisasi Investasi (Juta Rp.)			299.943,870	303.257,158	306.687,934	310.223,389	297.115,146	297.513,258	306.687,934	310223,389	
<b>2.</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>			<b>81,95</b>	<b>82,47</b>	<b>82,99</b>	<b>83,51</b>	81,43	81,80	<b>82,99</b>	<b>83,51</b>	
a.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			93,25	93,35	93,50	93,75	92,16	93,26	93,50	93,75	
<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>												
<b>1.</b>	<b>Penanaman Modal</b>											
	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi			<b>0,08%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,32%</b>	<b>(-26,69) %</b>	<b>0,13</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,32%</b>	
	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal			299.943,870	303.257,158	306.687,934	310223,389	297.115,146	297.513,258	306.687,934	310223,389	



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

No	Bidang	Isu-isu Strategi	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi
1	Bidang Penanaman Modal	Iklim investasi daerah yang masih belum stabil	Belum terinventarisasinyal potensi dan peluang potensi penanaman modal yang bernilai ekonomi (investasi)	<p>a. Data potensi masih kurang akurat dan tidak lengkap, hanya sebatas ikon</p> <p>b. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang metode penentuan potensi peluang penanaman modal</p> <p>c. Internas orgnisasi SDM dan Anggaran belum memadai</p>
2	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan SOP dan SPM masih belum optimal	<p>a. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk memiliki izin</p> <p>b. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang masih banyak menemui kendala dalam penyelesaiannya</p> <p>c. Belum optimalnya tugas teknis dan mekanisme proses pertimbangan/rekomendasi teknis</p>	<p>a. Pelaku usaha beranggapan bahwa biaya pengurusan izin mahal</p> <p>b. Lambatnya pertimbangan teknis dari dinas teknis terkait</p> <p>c. Kurangnya pegawai</p>

### **2.3.1 Tingkat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sampang**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, DPMPTSP Kabupaten Sampang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sampang**

Permasalahan dan hambatan DPMPTSP Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan Kualitas
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan Perizinan.
- c. Kurangnya konsistensi UMKM di dalam menjalankan usahanya.

#### **Hambatan DPMPTSP Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:**

- a. Belum optimalnya penggunaan system teknologi informasi
- b. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi
- c. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi antara PTSP dengan Dinas teknis terkait sektoral dalam nota kesepahaman.
- d. Meningkatnya kebutuhan warga untuk memperoleh kejelasan dan kepastian waktu untuk mengurus perizinan dan non perizinan.
- e. Partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan .

- f. Adanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas.

### **2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap capaian Program Nasional.**

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2019-2024, ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Sampang yaitu *“Sampang Hebat Bermartabat”* Dalam rangka pencapaian Visi secara efektif dan efisien disusunlah Misi Kepala Daerah Kabupaten Sampang yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan Bersatu.

Keterkaitan urusan Penanaman Modal dengan Misi Kepala daerah adalah pada Misi Kedua yaitu *“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”* sedangkan keterkaitan urusan perizinan dengan misi Kepala daerah adalah pada misi keempat yaitu *“Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”*.

### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sampang**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sampang mempunyai **tantangan** sebagai berikut :

- a. Akses Infrastruktur pendukung kegiatan logistic
- b. Adanya Pengaduan Masalah Perizinan
- c. Kemampuan msyarakat dalam memanfaatkan perijinan online ketidak sesuain kepemilikan perizinan

**Sedangkan peluang yang ada, antara lain:**

- a. Penerapan SPIPISE dan OSS
- b. Pengembangan Industri kreatif berbasis produk sebagai upaya

peningkatan daya saing ekonomi local.

### **2.3.5 Rekomendasi Strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan prioritas tahun 2023**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten sampang terdapat Rekomendasi Strategis guna meningkatkan Kinerja DPMPTSP di Kabupaten Sampang yaitu :

- a. Dalam Pengukuran Kinerja IKU sudah disusun dan ditetapkan secara formal dan sudah dipublikasikan di website DPMPTSP Kabupaten Sampang.
- b. Hasil Pengukuran Kinerja mulai dari semua tingkat Eselon akan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment bagi pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sampang.
- c. Mengefesiensikan pnggunaan sumber daya dalam laporan kinerja di DPMPTSP Kabupaten Sampang.
- d. Data untuk Laporan Kinerja sudah Valid
- e. Informasi kinerja sudah digunakan pada perbaikan perencanaan jangka menengah tahunan maupun dalam penetapan perjanjian kinerja yang disusun
- f. Sudah Menyusun Dokumen Rencana Aksi dengan mengadministrasikan kemajuan / progress kinerja.
- g. Meningkatkan Capaian sumber – sumber data yang kompeten, dapat ditelurusi sumber datanya

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sesuai dengan RPJMD rahun 2019 – 2024, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang untuk Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mengemban misi yang ke 2 yaitu ***Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif*** dengan Indikator Sasarannya Nilai Realisasi Investasi dan Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan sedangkan untuk Pelayanan Publik mengemban misi ke 4 yaitu : ***Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik*** dengan Indikator Sasarannya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Tema Pembangunan kabupaten Sampang tahun 2023 adalah Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, Kesehatan, dan Infrastruktur Sampang

Hebat Bermartabat dan untuk rencana Pembangunan tahun 2023 yaitu : ***Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung Daya Saing Daerah menuju Sampang Hebat Bermartabat*** .Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2023 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan kebutuhan riil DPMPTSP Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi DPMPTSP Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

**Tabel T – C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sampang**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dpmptsp Kab. Sampang			5.452.050.458	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dpmptsp Kab. Sampang			5.749.226.640	
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dpmptsp Kab. Sampang			5.452.050.458	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dpmptsp Kab. Sampang			5.749.226.640	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dpmptsp Kab. Sampang	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100 %	5.452.050.458	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dpmptsp Kab. Sampang	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100 %	4.695.945.232	
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dpmptsp Kab. Sampang	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	23.764.805	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dpmptsp Kab. Sampang	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	11.000.000	
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Renstra, Renja, SOP )	3 dokumen	2.859.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Renstra, Renja, SOP )	3 dokumen	2.000.000	

4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	2.892.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	2.000.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	1 dokumen	2.841.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	1 dokumen	1.000.000	
6.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</b>	1 dokumen	2.899.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</b>	1 dokumen	2.000.000	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</b>	1 dokumen	2.903.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</b>	1 dokumen	1.000.000	
8.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)</b>	5 Laporan	9.368.755	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)</b>	5 Laporan	3.000.000	
9.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>4.134.119.050</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>3.804.201.858</b>	
10.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	35 orang / bulan	4.126.588.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	35 orang / bulan	3.802.201.858	
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	1 dokumen	2.846.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	1 dokumen	1.000.000	

12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 dokumen	4.683.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 dokumen	1.000.000	
13.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>3.360.853</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	
14.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	2 dokumen	2.126.560	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	0 dokumen	0	
15.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	4 dokumen	1.234.293	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	0 dokumen	0	
16.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Rasio Pegawai yang mengikuti bimtek dan Jumlah ASN OPD</b>	<b>10 OK</b>	<b>56.411.460</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Rasio Pegawai yang mengikuti bimtek dan Jumlah ASN OPD</b>	<b>10 OK</b>	<b>12.532.000</b>	
17.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	32.235.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	
18.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7 Orang	24.176.460	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7 Orang	12.532.000	
19.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>310.338.610</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>167.000.000</b>	
20.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	15 paket	68.026.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	2 paket	10.000.000	



21.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	65 paket	13.891.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	3 paket	14.000.000	
22.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>	50 Paket	18.577.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>	1 Paket	17.000.000	
23.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>	2 Paket	14.182.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>	1 Paket	15.000.000	
24.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.</b>	4 Dokumen	4.264.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.</b>	2 Dokumen	3.000.000	
25.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	12 Laporan	7.406.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	1 Laporan	8.000.000	
26.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	12 Laporan	183.990.660	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	1 Laporan	100.000.000	
27.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>139.447.500</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100.000.000</b>	
28.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</b>	30 Unit	139.446.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</b>	10 Unit	100.000.000	
29.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</b>	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</b>	0	0	

30.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>582.093.600</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>410.711.374</b>	
31.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	1 Laporan	2.342.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	1 Laporan	2.500.000	
32.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	1 Laporan	215.033.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	1 Laporan	183.211.374	
33.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>	1 Laporan	364.717.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>	1 Laporan	225.000.000	
34.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>181.224.700</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>190.000.000</b>	
35.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b>	19 Unit	71.959.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b>	11 Unit	70.000.000	
36.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</b>	70 Unit	18.142.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</b>	70 Unit	20.000.000	
37.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</b>	2 unit	91.122.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</b>	2 unit	100.000.000	
38.	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>21.290.880</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>500.000</b>	

39.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	1 Laporan	21.290.880	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	1 Laporan	500.000	
40.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>JUMLAH POTENSI INVESTASI</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>202.867.567</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>JUMLAH POTENSI INVESTASI</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>300.000.000</b>	
41.	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Peluang Investasi</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>202.867.567</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Peluang Investasi</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>300.000.000</b>	
42.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	1 Dokumen	202.867.567	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	3 Dokumen	300.000.000	
43.	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMA)</b>	<b>2.800 investor</b>	<b>151.788.005</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMA)</b>	<b>2.800 investor</b>	<b>320.281.408</b>	
44.	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Investor</b>	<b>2.800 investor</b>	<b>151.788.005</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Investor</b>	<b>2.800 investor</b>	<b>320.281.408</b>	
45.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</b>	4 Dokumen	151.788.005	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</b>	4 Dokumen	320.281.408	
46.	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>PERSENTASE IZIN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU</b>	<b>100 %</b>	<b>204.310.019</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>PERSENTASE IZIN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU</b>	<b>100 %</b>	<b>333.000.000</b>	
		Dpmptsp Kab. Sampang	<b>PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI</b>	<b>100 %</b>			Dpmptsp Kab. Sampang	<b>PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI</b>	<b>100 %</b>		

47	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dpmptsp Kab. Sampang	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	100 %	204.310.019	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dpmptsp Kab. Sampang	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	100 %	333.000.000	
		Dpmptsp Kab. Sampang	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %			Dpmptsp Kab. Sampang	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		
		Dpmptsp Kab. Sampang	Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2 Dokumen			Dpmptsp Kab. Sampang	Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2 Dokumen		
48	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.500 Pelaku Usaha	165.159.394	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.500 Pelaku Usaha	300.000.000	
49	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	300 Orang	39.150.625	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	300 Orang	33.000.000	
50.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dpmptsp Kab. Sampang	JUMLAH PELAKU USAHA YANG MELAPOR DI LKPM	185 Pelaku Usaha	511.115.565	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dpmptsp Kab. Sampang	JUMLAH PELAKU USAHA YANG MELAPOR DI LKPM	185 Pelaku Usaha	0	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (DAK)
51	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	185 Pelaku Usaha	511.115.565	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	185 Pelaku Usaha	0	DAK
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan usaha	105.085.360	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 Kegiatan usaha	0	DAK

53	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 pelaku usaha	300.909.894	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dpmptsp Kab. Sampang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 pelaku usaha	0	DAK
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</b>	80 Kegiatan usaha	105.120.311	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</b>	0 Kegiatan usaha	0	DAK
55	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>NILAI INVESTASI PMDN</b>	<b>849.046,211 Juta Rp</b>	<b>225.293.173</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>NILAI INVESTASI PMDN</b>	<b>849.046,211 Juta Rp</b>	<b>100.000.000</b>	
56	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Nilai Investasi PMDN</b>	<b>849.046,211 Juta Rp</b>	<b>225.293.173</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Nilai Investasi PMDN</b>	<b>849.046,211 Juta Rp</b>	<b>100.000.000</b>	
57	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</b>	1 paket Aplikasi	225.293.173	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</b>	1 paket Aplikasi	100.000.000	
<b>TOTAL</b>					<b>Rp. 6.747.424.787</b>	<b>TOTAL</b>					<b>Rp. 5.749.226.640</b>

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2023 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Dpmpptsp Tahun 2023.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2023**

Perangkat Daerah : Dpmpptsp Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Dpmpptsp Naker pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN SAMPANG

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- a. Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan Tema *“Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung Daya Saing Daerah menuju Sampang Hebat Bermartabat”*. Dpmptsp sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2023**

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sampang
<b>Prioritas Pembangunan 1: Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</b>	<b>Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata</b>	<b>Prioritas Pembangunan 1: Pemantapan Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan.</b>
<b>Prioritas Pembangunan 2: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>	<b>Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur</b>	<b>Prioritas Pembangunan 1: Pemantapan Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan</b>
<b>Prioritas Pembangunan 3: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	<b>Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Penguatan Kemiskinan</b>	<b>Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pengentasan kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana dasar</b>
<b>Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>	<b>Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal</b>	<b>Prioritas Pembangunan 4: Menjaga Harmonisasi Kehidupan Masyarakat</b>
<b>Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	<b>Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi</b>	<b>Prioritas Pembangunan 1: Pemantapan Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan</b>
<b>Prioritas Pembangunan 6: Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan</b>	<b>Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Prioritas Pembangunan 1: Pemantapan Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan</b>

Perubahan Iklim		infrastruktur yang berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 7: Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 4: Menjaga Harmonisasi Kehidupan Masyarakat dan Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah

Sumber: Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2021

- b. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam PMDN 18 sesuai dengan urusan Dpmptsp Kabupaten Sampang sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah  
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Berdasarkan PMDN 81 Tahun 2022	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
II.	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.	Penanaman Modal			
	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	0,24	-
	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Juta Rp.	306.687,93	1.200.000.000.000

### 3.2 Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Sampang

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Sampang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Kabupaten Sampang yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu *Misi Ke-2 : Mewujudkan kemandiraan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif*. Dan yang terkait dengan urusan Perizinan ada pada *misi ke – 4 : Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik*.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja seperti diuraikan pada Tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Dpmptsp Kabupaten Sampang Tahun 2023



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4
1.	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	0,24 %
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi (Juta Rp.)	306.687,934
2.	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00
	<b>Sasaran :</b>		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,50

1

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dpmpstsp Kabupaten Sampang Tahun 2023

Dalam merumuskan program kegiatan Dpmpstsp mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Dpmpstsp mendukung pada pencapaian **misi 2** yaitu : *“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agrobisnis , Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ”* **misi 4** yaitu *“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”*. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dpmpstsp yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

#### b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Rancangan awal Renstra Dpmpstsp Tahun 2019-2024, Dpmpstsp Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian Misi 2 dan misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran *“Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”* dan *“ Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik”*.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengolahan Data dan system Informasi Penanaman Modal

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Dpmpptsp Tahun 2023 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entri rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dpmpptsp Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .

- c. Program dan Kegiatan Dpmpptsp sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 , yaitu sebagai berikut:

**Tabel T-C. 33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dpmpptsp Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Pemerintah Kabupaten Sampang**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.749.226.640				9.535.066.539
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.695.945.232	DAU			7.745.066.539
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIFASILITASI	Dpmpptsp Kab. Sampang	100 %	5.829.996.002	DAU		100 %	5.872.750.848
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Dpmpptsp Kab. Sampang	100 %	11.000.000	DAU		100 %	19.000.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Renstra, Renja, SOP )	Dpmpptsp Kab. Sampang	3 dokumen	2.000.000	DAU		3 dokumen	3.000.000
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dpmpptsp Kab. Sampang	1 dokumen	2.000.000	DAU		1 dokumen	3.500.000
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dpmpptsp Kab. Sampang	1 dokumen	1.000.000	DAU		1 dokumen	2.000.000
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dpmpptsp Kab. Sampang	1 dokumen	2.000.000	DAU		1 dokumen	3.500.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 dokumen	1.000.000	DAU		1 dokumen	2.000.000
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	5 Laporan	3.000.000	DAU		5 dokumen	5.000.000
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>100 %</b>	<b>3.804.201.858</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>4.005.000.000</b>
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	35 orang / bulan	3.802.201.858	DAU		35 orang / bulan	4.000.000.000
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 dokumen	1.000.000	DAU		1 dokumen	2.500.000
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dpmptsp Kab. Sampang	3 dokumen	1.000.000	DAU		3 dokumen	2.500.000
<b>2.18.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>4.000.000</b>
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	0 dokumen	0	DAU		1 dokumen	2.500.000
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	0 dokumen	0	DAU		4 dokumen	1.500.000
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rasio Pegawai yang mengikuti bimtek dan Jumlah ASN OPD</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>10 OK</b>	<b>12.532.000</b>	<b>DAU</b>		<b>10 OK</b>	<b>13.000.000</b>
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dpmptsp Kab. Sampang	0	0	DAU		10 Ok	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dpmptsp Kab. Sampang	7 Orang	12.532.000	DAU		8 orang	13.000.000
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>100 %</b>	<b>167.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>183.500.000</b>
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	2 paket	10.000.000	DAU		2 paket	10.500.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	3 paket	14.000.000	DAU		3 paket	15.000.000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 Paket	17.000.000	DAU		1 Paket	20.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 Paket	15.000.000	DAU		10 jenis	16.000.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	2 Dokumen	3.000.000	DAU		2 Dokumen	3.500.000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 Laporan	8.000.000	DAU		1 Laporan	8.500.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 Laporan	100.000.000	DAU		1 Laporan	110.000.000
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>100 %</b>	<b>100.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>2.795.066.539</b>
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	10 Unit	100.000.000	DAU		10 Unit	150.000.000
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	0	0	DAU		1 Unit	2.645.066.539

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>100 %</b>	<b>410.711.374</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>453.000.000</b>
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 Laporan	2.500.000	<b>DAU</b>		1 Laporan	3.000.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 Laporan	183.211.374	<b>DAU</b>		1 Laporan	200.000.000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 Laporan	225.000.000	<b>DAU</b>		1 Laporan	250.000.000
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>100 %</b>	<b>190.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>271.000.000</b>
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	11 Unit	70.000.000	<b>DAU</b>		11 Unit	100.000.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	70 Unit	20.000.000	<b>DAU</b>		70 Unit	21.000.000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	2 unit	100.000.000	<b>DAU</b>		2 unit	150.000.000
<b>2.18.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>100 %</b>	<b>500.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>1.500.000</b>
2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1 Laporan	500.000	<b>DAU</b>		1 Laporan	1.500.000
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>JUMLAH POTENSI INVESTASI</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>300.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 Jenis</b>	<b>350.000.000</b>
2.18.02.2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peluang Investasi</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>300.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 Jenis</b>	<b>350.000.000</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	3 Dokumen	300.000.000	DAU		3 Dokumen	350.000.000
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMA)</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>2.800 investor</b>	<b>320.281.408</b>	<b>DAU</b>		<b>2.900 investor</b>	<b>325.000.000</b>
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Investor</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>2.800 investor</b>	<b>320.281.408</b>	<b>DAU</b>		<b>2.900 investor</b>	<b>325.000.000</b>
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	4 Dokumen	320.281.408	DAU		4 Dokumen	325.000.000
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE IZIN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>100 %</b>	<b>333.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>385.000.000</b>
		<b>PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu</b>	<b>Dpmptsp Kab. Sampang</b>	<b>100 %</b>	<b>333.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>385.000.000</b>
		<b>Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
		<b>Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>		<b>2 Dokumen</b>				<b>3 Dokumen</b>	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	1.500 Pelaku Usaha	300.000.000	DAU		1.500 Pelaku Usaha	350.000.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan	<b>Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	300 Orang	33.000.000	DAU		350 Orang	35.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Non Perizinan	<b>Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</b>							
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>JUMLAH PELAKU USAHA YANG MELAPOR DI LKPM</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>185 Pelaku Usaha</b>	<b>0</b>	<b>DAK NON FISIK</b>		<b>190 Pelaku Usaha</b>	<b>0</b>
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>185 Pelaku Usaha</b>	<b>0</b>	<b>DAK NON FISIK</b>		<b>190 Pelaku Usaha</b>	<b>580.000.000</b>
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	0 pelaku usaha	0	<b>DAK NON FISIK</b>		10 Kegiatan usaha	110.000.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	0 pelaku usaha	0	<b>DAK NON FISIK</b>		500 Pelaku Usaha	375.000.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	0 pelaku usaha	0	<b>DAK NON FISIK</b>		80 Kegiatan Pelaku Usaha	95.000.000
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>NILAI INVESTASI PMDN</b>	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>849.046,211 Juta Rp</b>	<b>100.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>967.865,730 Juta Rp</b>	<b>150.000.000</b>
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Nilai Investasi PMDN	Dpmptsp Kab. Sampang	<b>849.046,211 Juta Rp</b>	<b>100.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>967.865,730 Juta Rp</b>	<b>150.000.000</b>



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<b>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</b>	Dpmpstp Kab. Sampang	1 paket Aplikasi	100.000.000	DAU		1 paket Aplikasi	150.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>Rp. 5.749.226.640</b>			<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 9.535.066.539</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP**  
**KABUPATEN SAMPANG**

**4.1 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang yaitu meningkatnya investasi daerah dalam mewujudkan masyarakat Sampang Hebat Bermartabat dan meningkatnya kualitas pelayanan publik, telah ditetapkan sasaran untuk meningkatnya realisasi investasi daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 dengan sumber dana dari APBD / DAU ( Dana Alokasi Umum) Kabupaten Sampang dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2023**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.749.226.640
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.749.226.640
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100 %	4.695.945.232
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	11.000.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Renstra, Renja, SOP )	3 dokumen	2.000.000
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	2.000.000
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	5 Laporan	3.000.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	3.804.201.858

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang / bulan	3.802.201.858
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.000.000
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 dokumen	1.000.000
<b>2.18.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 dokumen	0
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rasio Pegawai yang mengikuti bimtek dan Jumlah ASN OPD</b>	<b>10 OK</b>	<b>12.532.000</b>
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	7 Orang	12.532.000
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>167.000.000</b>
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.000.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	14.000.000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	2 Dokumen	3.000.000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.000.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100.000.000</b>
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>410.711.374</b>
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	183.211.374
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	225.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	190.000.000
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	70.000.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	20.000.000
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	100.000.000
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	500.000
2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	500.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH POTENSI INVESTASI	4 Jenis	300.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi	4 Jenis	300.000.000
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMA)	2.800 investor	320.281.408
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	2.800 investor	320.281.408
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	320.281.408
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE IZIN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU	100 %	333.000.000
		PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI	100 %	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	100 %	333.000.000
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	
		Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2 Dokumen	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.500 Pelaku Usaha	300.000.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	300 Orang	33.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH PELAKU USAHA YANG MELAPOR DI LKPM	185 Pelaku Usaha	0
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	185 Pelaku Usaha	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 pelaku usaha	0
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 pelaku usaha	0
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	0 pelaku usaha	0
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>NILAI INVESTASI PMDN</b>	<b>849.046,211 Juta Rp</b>	<b>100.000.000</b>
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Investasi PMDN</b>	<b>849.046,211 Juta Rp</b>	<b>100.000.000</b>
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 paket Aplikasi	100.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 5.749.226.640</b>

Rencananya Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu akan melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dengan total anggaran **Rp. 5.749.226.640** yang terdiri dari **6 program, 13 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.**

Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan Sub kegiatannya yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu di lingkup Kabupaten Sampang.

#### **4.2 INOVASI DPMPTSP**

Inovasi DPMPTSP adalah suatu bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan di DPMPTSP itu sendiri dan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan di lingkup DPMPTSP. Secara Teknis Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang ditempuh untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang ada di hadapi DPMPTSP serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Sampang dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang di mana DPMPTSP itu sendiri termasuk kedalam Misi 2 dan misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran *“Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”* dan *“ Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik”*.

Adapun Inovasi yang digagas oleh DPMPTSP yang akan dilaksanakan dan dikembangkan pada tahun 2023 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/ atau untuk mengatasi persoalan yang di hadapi dalam pelaksanaan urusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja antara lain dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Inovasi DPMPTSP dalam Rangka Mempercepat Pencapaian Target Kinerja**

NAMA INOVASI	DESKRIPSI	PENAGGUNG JAWAB
1	2	3
<p><b>LANJUT MAS BROOO.....!!! (</b></p>	<p><b>Latar Belakang:</b></p> <p>Kehadiran layanan antar jemput pengurusan perizinan berusaha (IUMK) bagi penyandang disabilitas di Kab. Sampang. Peran dukungan dari pemerintah Kab. Sampang salah satunya tercermin dari pertemuan Bupati Sampang dengan penyandang disabilitas pada tanggal 16 Juni 2020 di Kantor Bupati Sampang, dimana pertemuan tersebut intinya penyandang Disabilitas memohon kepada Pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal ini Bupati Sampang untuk mempriorotaskan yaitu : Bantuan Sosial, Perizinan dan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Atas permintaan tersebut di atas Bupati Sampang langsung memanggil 3 OPD terkait tersebut (Dinsos, Diskopindag, DPMPTSP dan Naker serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) untuk menyikapi pertemuan antara Bupati Sampang dengan Penyandang Disabilitas dimaksud diatas.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kemudahan pelayanan perijinan berusaha kepada Penyandang Disabilitas Kab. Sampang</li> <li>2. Memberikan ruang interaksi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan di desanya</li> </ol> <p><b>Manfaat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya motivasi dan rasa percaya dari penyandang disabilitas di Kab. Sampang, karena merasa diakui eksistensinya</li> <li>2. Meningkatkannya rasa empati / kagum dari warga sekitar kepada Pemerintah Kab. Sampang, khususnya setelah inovasi ini diluncurkan kepada penyandang disabilitas di Kab. Sampang yang telah mendapatkan pelayanan antar jemput perizinan berusaha</li> </ol> <p><b>Hasil Inovasi:</b></p> <p>Pelayanan Perizinan Berusaha (IUMK) yag dapat dijangkau oleh Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sampang yang memiliki hambatan untuk datang ke DPMPTSP dan Kab. Sampang karena kondisi fisik dan mentalnya</p>	<p><b>DPMPTSP</b></p> <p><b>Bidang Pelayanan Penanaman Modal</b></p>

<p>“ Ya Toreh Ngoladhi MPP Sampang “</p>	<p><b>Latar Belakang :</b></p> <p>Aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat ataupun daerah serta pelayanan BUMD / Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintegrasikan berbagai layanan instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;</li> <li>2. Menyederhanakan persyaratan, prosedur dan system;</li> <li>3. Meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan public;</li> <li>4. Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada lokasi gedung;</li> <li>5. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;</li> <li>6. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan</li> </ol> <p><b>Manfaat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.</li> </ol> <p><b>Hasil Inovasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga menjadi semakin cepat, mudah dan transparan</li> </ol>	
--	--	--

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis ( RENSTRA ) DPMPTSP Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Sampang Tahun 2021 dan merupakan dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.

Pencapaian Rencana Kerja ( RENJA ) DPMPTSP Kabupaten Sampang tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) revisi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 dan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024. Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Kerja ( Renja ) ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu kabupaten Sampang dapat mencapai target kinerja yang diinginkan khususnya bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu umumnya bagi pihak – pihak yang terkait.

Komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sampang sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak. Harapan kami semoga Renja Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program- program dan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance, Peningkatan Penempatan Pencari Kerja, dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Sampang.

**Sampang, Agustus 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMPANG**

**Ir. Majid Syamroni, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670324 199710 1 001**